

# **FAKTOR PENDORONG MORO ISLAMIC LIBERATION FRONT (MILF) UNTUK MENANDATANGANI FRAMEWORK AGREEMENT OF BANGSAMORO (FAB) DENGAN PEMERINTAH FILIPINA PADA TAHUN 2012**

Yolanda Tandio<sup>1)</sup>, Idin Fasisaka<sup>2)</sup>, Ni Wayan Rainy Priadarsini<sup>3)</sup>

<sup>123)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: yolandatandio@gmail.com<sup>1</sup>, idinfasisaka@unud.ac.id<sup>2</sup>, rainypriadarsini@unud.ac.id<sup>3</sup>

## **ABSTRACT**

*The Philippine government has had a prolonged conflict with armed group in Mindanao, South Philippines. One of the most influential groups in Mindanao is a MILF. MILF wants to establish an independent and sovereign state in the Southern Philippines as a result of the efforts of Christianization by the Philippine Government to cause land disputes and power shift. However, it has never been realized until giving rise to various rebellions. The various peace process has been done, such as the Tripoli Agreement, the Final Peace Agreement and the Memorandum of Agreement on Ancestral Domain but always failed. Finally succeeded with the signing of the Framework Agreement of Bangsamoro (FAB) in 2012 between the Philippine government and the MILF. FAB will contain the guarantee of basic rights Bangsamoro by the Government. This study shows that the motivating factor for MILF to sign FAB with the Philippine Government is a political recognition given to the Bangsamoro, special autonomy, as well as the creation of the Bangsamoro Basic Law that will include various things about the basic rights to the Bangsamoro.*

**Keywords: Motivating factor, Political recognition**

## **1. PENDAHULUAN**

Ketidakstabilan politik dan ekonomi seringkali menjadi alasan utama terjadinya berbagai konflik, baik itu konflik internal maupun eksternal. Filipina juga mengalami konflik serupa, yaitu konflik antara Bangsamoro dengan Pemerintah Filipina itu sendiri. Bangsamoro bukan merupakan ras, etnis, waktu, atau geografis tertentu. Bangsamoro merujuk pada kelompok orang yang berafiliasi kepada agama tertentu, dalam hal ini adalah agama Islam (VOA Islam). Konflik yang telah terjadi selama 4 dekade ini membuat Pemerintah Filipina

selalu mengupayakan berbagai jalan damai agar konflik yang terjadi dengan Bangsamoro dapat terselesaikan. Pemerintah Filipina berusaha membuat nota kesepakatan dengan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF).

Konflik ini terjadi jauh sebelum Filipina mencapai kemerdekaannya, yaitu sejak penjajahan Spanyol hingga Amerika Serikat. Konflik bermula, ketika kedua penjajah tersebut memiliki misi untuk melakukan Kristenisasi di Utara Filipina. Hingga akhirnya pada saat Filipina telah merdeka, konflik tetap berlangsung, yaitu

dengan adanya perpindahan penduduk Luzon dan Visayas ke Mindanao yang dirancang dalam program kebijakan pemerintah yang menyebabkan Bangsamoro merasa terpinggirkan dengan adanya pendatang tersebut (Guerra, 2010). Perpindahan ini menyebabkan munculnya sengketa lahan, pergeseran kekuasaan, perpindahan ekonomi dari Bangsamoro ke pendatang, dan stereotip dari pendatang terhadap Bangsamoro (Guerra, 2010).

Ketidakadilan terhadap kepemilikan tanah merupakan bagian dari beberapa indikator penyebab munculnya berbagai gerakan separatis di Filipina Selatan yang menginginkan kemerdekaan, salah satunya adalah kelompok pemberontak terbesar dan paling berpengaruh di Filipina yaitu *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). MILF merupakan perpecahan dari *Moro National Liberation Front* (MNLF) dan dibentuk pada tahun 1984 oleh Salamat Hasim, yang awalnya merupakan Wakil Ketua dari MNLF.

Perjuangan MILF adalah untuk memperoleh kembali kemerdekaan yang telah dirampas secara immoral dan illegal, dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri (*Right to self-determination*). MILF memiliki 46 *camp mujahidin* (pejuang keadilan atau pejuang kemerdekaan) dan mengorganisir 120.000 prajurit bersenjata dan tidak bersenjata serta ribuan pengikut lainnya. Tentara MILF dikenal sebagai *Bangsamoro Islamic Armed Forces* (BIAF) yang terdiri dari 60% pasukan regular. Pemerintah Filipina sendiri memperkirakan organisasi ini memiliki 8000 tentara.

Pemerintah memperkirakan MILF tersebar merata di seluruh Pulau Mindanao yang terdiri dari 1,6 juta orang-orang Manguindanao, 1,9 juta orang Maranao, dan sisanya merupakan orang-orang Iranun dari Cotabato Utara dan Basilan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi ini paling banyak memperoleh dukungan dari masyarakat Bangsamoro dibandingkan dengan organisasi serupa lainnya, seperti MNLF, Abu Sayyaf, *Bangsamoro Islamic Freedom Fighter* (BIFF), *Justice for Islamic Movement*, Ansar Khalifah Filipina (AKP), dan *Moro Independent Movement* (MIM).

Perspektif MILF adalah tetap konsisten bahwa tujuan untuk memperoleh kemerdekaan Bangsamoro ditempatkan sebagai kerangka dasar perjuangan melalui diplomasi. MILF berusaha untuk terus menyuarakan keinginan mereka kepada pemerintah melalui diplomasi. Namun, semua tuntutan yang disuarakan oleh MILF tidak mendapat respon dari Pemerintah Filipina. Akibat dari tuntutan MILF tidak didengar Pemerintah, maka MILF melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap warga sipil di Filipina agar Pemerintah mau merespon tuntutan mereka. Antara tahun 2000 dan 2010 diperkirakan sebesar 6.935 orang telah menjadi korban. Kemudian pada tahun 2011 sekitar sekitar 2 juta penduduk telah mengungsi dan diperkirakan jumlah kematian terkait pertempuran berkisar 120.000 orang (Lisa Huang, Victor Musembi, dan Ljiljana Petronic: 2012). Berbagai penyerangan yang dilakukan oleh MILF membuat Pemerintah Filipina mencari

berbagai cara untuk mengupayakan jalan damai demi mengakhiri penyerangan-penyerangan tersebut.

Tercatat berbagai perjanjian antara Bangsamoro dengan Pemerintah Filipina telah dirancang dan ditandatangani, seperti Perjanjian Tripoli, *Final Peace Agreement* (FPA), dan *Memorandum of Agreement on Ancestral Domain* (MOA-AD). Namun perjanjian-perjanjian tersebut selalu mengalami kegagalan hingga menyebabkan berbagai pemberontakan yang dilakukan Bangsamoro sebagai bentuk kekecewaan mereka. Pemerintah Filipina kembali mengupayakan jalan damai agar pemberontakan serta berbagai penyerangan dapat dihentikan.

Akhirnya pada tahun 2012 Pemerintah Filipina berusaha membuka kembali dialog dengan MILF untuk membicarakan konflik yang terjadi. Dalam dialog kesepakatan tersebut Bangsamoro yang diwakili oleh MILF mengajukan berbagai tuntutan yang mereka inginkan. Tidak hanya Bangsamoro, Pemerintah Filipina juga mengajukan tuntutan dalam dialog tersebut. Setelah melalui dialog yang panjang, akhirnya disepakatilah bahwa Pemerintah Filipina akan menjamin hak-hak dasar Bangsamoro dalam berbagai hal. Atas kesepakatan itulah, maka MILF mau menandatangani nota kesepakatan yang diajukan oleh Pemerintah Filipina. Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2012 dan diberi nama *Framework Agreement of Bangsamoro* (FAB). Nota kesepakatan yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak

diharapkan mampu benar-benar menyelesaikan konflik yang terjadi di Filipina Selatan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada penelitian ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama menggunakan penelitian yang ditulis oleh Fatimah Saprianingsih dengan judul: "Resolusi Konflik dan Gerakan Separatisme GAM di Aceh: Studi Kasus Peran *Crisis Management Initiative* (CMI) sebagai Mediator Konflik antara Pemerintah RI dengan GAM di Aceh. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai akar konflik yang terjadi antara GAM dan Pemerintah RI hingga melahirkan sebuah kesepakatan yang diberi nama *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia.

Faktor Pendorong GAM mau duduk bersama dengan Pemerintah RI hingga menandatangani MoU adalah adanya bencana alam gempa bumi dan Tsunami di Aceh yang membuat mereka sadar bahwa mereka tidak mampu mengembalikan keadaan Aceh seperti semula tanpa bantuan Pemerintah. Selain itu, adanya kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih menekankan dialog dari pada penggunaan kekerasan. Dan yang terpenting adalah diberikannya sebuah otonomi khusus bagi Aceh sebagai sebuah upaya resolusi konflik agar konflik yang terjadi dapat dihentikan.

Kajian Pustaka yang kedua menggunakan penelitian yang ditulis oleh Azmi Muttaqin yang berjudul: "Otonomi Khusus Papua: Sebagai Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua". Penelitian ini juga menjelaskan mengenai akar konflik yang terjadi di Papua hingga penyelesaian konflik seperti penelitian yang ditulis oleh Fatimah Saprianingsih. Masyarakat Papua menganggap bahwa kekuasaan Indonesia atas Papua sesuai dengan misi UNTEA tidaklah *legitimate*. Mereka menganggap bahwa kemerdekaan Papua telah dideklarasikan pada pengibaran bendera *Morning Star* (Bintang Kejora) pertama kali pada 1 Desember 1961. Mereka menginginkan dikembalikannya kemerdekaan Papua yang dulu.

Untuk meredam keinginan Masyarakat Papua tersebut, Pemerintah mengupayakan berbagai jalan, yaitu dengan memberikan Papua sebuah otonomi khusus bagi Papua. Melalui otonomi khusus tersebut, Pemerintah memberikan kesempatan bagi kaum minoritas untuk terlibat aktif dalam politik, menawarkan prospek bagi kaum minoritas mempertahankan kebudayaannya, meningkatkan kesempatan untuk lahir dan terbangunnya koalisi antar etnis, dan memberikan kesempatan yang luas bagi daerah-daerah yang berpotensi terpecah belah untuk mengusahakan jalan keluar secara konstitusional. Secara tidak langsung, hal-hal tersebutlah yang membuat Papua akhirnya mau untuk meredam keinginan mereka.

Kedua penelitian tersebut digunakan sebagai acuan dalam menulis penelitian ini, karena penelitian tersebut memiliki kesamaan pola dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti.

## **2.2. Political Recognition (Pengakuan Politik)**

Pengakuan politik merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi sebuah kaum minoritas. Melalui pengakuan politik, kelompok minoritas akan merasa benar-benar ada dan dihormati sebagai bagian dari masyarakat secara menyeluruh. Pengakuan politik juga dapat dikatakan mampu meminimalkan diskriminasi terhadap sebuah kelompok minoritas atas budaya maupun kultur yang mereka anut.

Charles Taylor mengemukakan bahwa masalah terbesar dalam multikulturalisme adalah pentingnya pengakuan (*recognition*) terhadap identitas bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan (*subaltern*). Selain itu, Taylor juga berpendapat bahwa dalam dunia internasional yang multicultural, tiap negara bangsa akan saling bersaing pada aspek budaya demi mendapatkan pengakuan secara politis. Karena pengakuan politis merupakan motor penggerak utama tumbuhnya identitas kebangsaan dan rasa nasionalisme yang menjadi symbol kebanggaan dari sebuah negara bangsa (Charles Taylor, 1992)

Selain Charles Taylor, Will Kymlicka juga berpendapat bahwa dalam negara bangsa yang multicultural, identitas harus diberikan kepada kaum minoritas sebagai suatu pengakuan terhadap hak universal mereka sebagai warganegara secara

keseluruhan, walaupun memiliki kebudayaan maupun adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat secara keseluruhan dalam sebuah negara (Will Kymlicka, 2001).

### 2.3. Otonomi Khusus

Secara operasional, otonomi didefinisikan sebagai pemberian mekanisme pemerintahan sendiri secara internal kepada wilayah atau sekelompok orang yang dengan hal tersebut mengakui sebagian pemberian kemerdekaan dan kebebasan dari pengaruh pemerintah nasional dan/atau pemerintah pusat (Streiner, 1991: 1542 dalam Cornell, 2007: 249). Dalam perspektif Hukum Internasional, otonomi menunjuk pada sebagian wilayah negara yang memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dalam beberapa kewenangan melalui penerapan hukum dan peraturan tanpa menyatakan memiliki negara sendiri (Cornell, 2007: 249).

Dengan demikian otonomi secara implisit mengakui hak-hak khusus sebuah wilayah untuk memiliki hak, kewenangan, dan tanggungjawab yang secara administratif yang sebagian terpisah dari pemerintah pusat. Konsepsi otonomi yang digunakan di dalam makalah ini meliputi otonomi dalam berbagai aspek, termasuk otonomi wilayah, otonomi budaya dan otonomi finansial.

Pemberian otonomi khusus dapat dikatakan sebuah upaya untuk menyelesaikan permasalahan maupun konflik yang ada (resolusi konflik). Hal itu dikarenakan otonomi dapat ditempatkan sebagai sebuah posisi yang paling

strategis, yaitu antara opsi merdeka dan opsi perlingungan hak-hak kaum minoritas. Selain itu, otonomi juga dianggap sebagai sebuah mekanisme yang mampu menjamin hak-hak dasar dalam sebuah wilayah. Dan yang terpenting adalah otonomi sebagai alternatif dalam penyelesaian konflik yang terbukti secara efektif mampu diterima sebagai bentuk kompromi *win to win solution* oleh pihak yang bertikai.

### 2.4. *De-escalation Conflict* (De-eskalasi Konflik)

De-eskalasi konflik merupakan tahapan dimana konflik masih menyebabkan banyak korban jiwa berjatuh, pihak yang bertikai harus menemukan waktu yang tepat untuk memulai (*entry point*) proses resolusi konflik. Tahap ini masih melibatkan berbagai bentuk kontak senjata. resolusi konflik akan tercapai apabila kedua belah pihak benar-benar menginginkan adanya resolusi konflik

Konsep tentang *entry point* ini dapat ditemukan dalam tulisan Zartman (1985) tentang kondisi *hurting stalemate*. Kondisi *hurting stalemate* dapat dikenali dengan adanya keterbukaan kedua belah pihak agar mau berunding demi menurunkan kerugian yang terjadi akibat dari adanya peperangan. Konsep ini didukung oleh Bloomfield, Nupen dan Haris (2000). *Entry point* berlaku ketika adanya pihak yang menurunkan eskalasi konflik (Kriesberg, 1991).

Setelah berhasil menemukan *entry point* maka tahap kedua ialah mengijinkan adanya pihak luar untuk meringankan beban korban akibat konflik yang terjadi

(Anderson, 1996). Usaha selanjutnya adalah menciptakan suasana yang kondusif untuk melakukan transformasi sosial dan politik. Misalnya mengizinkan kelompok yang bertikai untuk mencapai pemahaman timbal-balik dan mengeksplorasi berbagai bentuk alternative peredaman konflik. Alternatif ini dapat dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Contoh aktualnya dikemukakan oleh Rothman (1992) yang menawarkan empat komponen utama proses problem-solving.

Komponen pertama adalah masing-masing pihak mengakui keberadaan pihak lain untuk melakukan komunikasi tingkat awal. Komponen *kedua* adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang akar konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, serta kendala-kendala yang menghambat terjadinya resolusi konflik. Komponen *ketiga* adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian. Dan komponen terakhir adalah *problem-solving workshop* yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses resolusi konflik.

Konsep de-eskalasi konflik ini dapat digunakan untuk menggambarkan konflik yang terjadi di Filipina hingga upaya perjanjian dapat ditemukan untuk mengakhiri konflik yang ada. Upaya perjanjian yang dilakukan tersebut mencerminkan konflik yang ada mulai dapat diatasi.

### **3. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena ataupun konflik yang terjadi dalam bentuk narasi. Penelitian ini akan menggambarkan konflik yang terjadi di Filipina Selatan, yaitu antara Bangsamoro dengan Pemerintah Filipina. Penelitian ini dipilih karena penulis ingin menggambarkan faktor apa saja yang mendorong MILF untuk menandatangani FAB dengan Pemerintah Filipina pada tahun 2012.

Jenis sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data asli. Data tersebut bisa berasal dari catatan, seperti buku, web resmi, jurnal, maupun bulletin yang sifatnya dokumentasi (Silalahi 2012). Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, berita, baik itu koran ataupun internet. Penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi. Data-data yang diperoleh akan lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk narasi. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan faktor apa yang mendorong MILF mau menandatangani FAB dengan Pemerintah Filipina.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Konflik antara Pemerintah dengan Bangsamoro**

Konflik yang terjadi di Filipina Selatan yang melibatkan Bangsamoro telah

berlangsung selama 4 dekade. Awalnya konflik yang terjadi melibatkan Bangsamoro dengan para penjajah yang menginginkan adanya Kristenisasi di wilayah Filipina Selatan. Konflik tersebut terjadi jauh sebelum Filipina mendapatkan kemerdekaannya. Setelah Filipina mendapatkan kemerdekaannya, barulah konflik tersebut melibatkan Pemerintah Filipina. Konflik antara Pemerintah Filipina dengan Bangsamoro ini akibat dari adanya modernisasi yang dibawa oleh orang-orang Amerika. Namun, Bangsamoro tidak mau menerima modernisasi tersebut dan tetap mempertahankan agama serta kebudayaan mereka. Sejarah konflik di Filipina Selatan ini akan dibagi menjadi 3 periode, yaitu Periode Sebelum Merdeka, Periode Peralihan, dan Periode Setelah Merdeka.

Pada periode Sebelum Merdeka, Spanyol dan Amerika Serikat melakukan penjajahan di Filipina. mereka memiliki misi yang sama, yaitu sama-sama ingin melakukan Kristenisasi di Filipina. Setelah berhasil melakukan Kristenisasi di Filipina Utara, mereka berusaha melakukan Kristenisasi di Filipina Selatan, yaitu Pulau Mindanao yang menganut agama Islam. Namun usaha mereka mengalami kegagalan karena umat Muslim Mindanao tidak menerima hal itu dan tetap ingin mempertahankan kebudayaan serta adat istiadat mereka yang telah lama mereka anut sehingga terjadilah perang antara umat Muslim Mindanao dan para penjajah. Hingga akhirnya mereka di-*stigmatisasi* (julukan terhadap hal-hal yang buruk) sebagai "*Moor*" (Moro). Moro memiliki arti orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan

dan *huramentados* (pembunuh) (Wiharyanto, 2011: 39). Pada dasarnya, Amerika juga ingin memasukkan kaum Muslimin ke dalam arus utama masyarakat Filipina di Utara dan mengasimilasi kaum Muslim kedalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Kristen.

Pada periode peralihan, mulailah terjadi perebutan tanah akibat adanya program pemukiman besar-besaran bagi orang-orang Utara dengan tujuan untuk menghancurkan keragaman (*homogeneity*) dan keunggulan jumlah Bangsamoro di Mindanao serta berusaha mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat Filipina secara umum yang memeluk agama Kristen.

Kepemilikan tanah yang begitu mudah dan mendapat legalisasi dari pemerintah tersebut mendorong migrasi dan pemukiman besar-besaran bagi orang-orang Utara ke Mindanao. Banyak pemukin yang datang, seperti di Kidapawan, Manguindanao, mengakui bahwa motif utama kedatangan mereka ke Mindanao adalah untuk mendapatkan tanah.

Dan yang terakhir adalah periode setelah merdeka. Walaupun Filipina telah mendapatkan kemerdekaannya, Bangsamoro tetap mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan marjinalisasi oleh Pemerintah mereka sendiri seperti kemiskinan, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat pendidikan di wilayah Moro, bahkan tidak jarang diskriminasi telah mengarah kepada kekerasan militer.

Pemerintah tetap memasukkan wilayah Mindanao kedalam wilayah

administratif Filipina dan tidak merespon dengan petisi-petisi yang diajukan oleh orang-orang Moro. Pemerintahan Manuel Quezon tidak memerdulikan tuntutan orang-orang Moro di Mindanao, dan bahkan menempatkan Mindanao sebagai salah satu aset penting untuk menyelesaikan masalah yang ada di Luzon dan Visayas seperti masalah pertanahan dan investasi ekstratif maupun agraris. Kebijakan itu diambil karena Mindanao merupakan wilayah yang mempunyai ketersediaan lahan sangat luas dan sumber daya alam untuk investasi yang besar. Pemerintah kemudian merancang program untuk melakukan perpindahan penduduk Luzon dan Visayas ke Mindanao (Guerra, 2010).

Adanya berbagai tindakan diskriminasi yang dilakukan menyebabkan munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh Bangsamoro terhadap Pemerintah, salah satunya adalah *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). MILF merupakan sebuah organisasi yang didirikan sebagai suatu bentuk representatif dari Bangsamoro secara meluas. MILF terbentuk karena adanya perlakuan diskriminatif pemerintah Filipina atas muslim Moro yang menginginkan dibentuknya sebuah negara independen di Filipina Selatan.

Dari ketiga periode tersebut, dapat dilihat bahwa pada setiap periode, Pemerintah Filipina selalu berusaha untuk menghilangkan identitas yang melekat pada Bangsamoro. Penghilangan identitas tersebut dilakukan dengan cara melakukan upaya Kristenisasi bagi Bangsamoro yang mendiami Filipina bagian selatan. Selain

itu, adanya program pemerintah yang melakukan migrasi besar-besaran warga Filipina Utara ke selatan juga dilakukan untuk mengasimilasi Bangsamoro ke dalam masyarakat Filipina secara keseluruhan untuk menghancurkan perbedaan yang ada di Filipina. Akibat dari adanya migrasi inilah yang kemudian memunculkan perebutan sumber daya yang ada di Filipina Selatan, seperti misalnya lahan untuk pemukiman.

Perebutan sumber daya tersebut menyebabkan Bangsamoro merasa tidak pernah diakui sebagai masyarakat asli yang sejak dulu mendiami pulau Mindanao. Bangsamoro yang tidak pernah mendapat pengakuan akhirnya memunculkan rasa dendam akibat dari adanya rasa terpinggirkan oleh pemerintah. Atas dasar itulah, muncullah berbagai organisasi masyarakat yang menjadi representasi dari Bangsamoro, salah satunya adalah MILF. MILF melakukan pemberontakan sebagai bentuk protes dan rasa kekecewaan terhadap Pemerintah Filipina yang tidak pernah berlaku adil hingga menjatuhkan banyak korban jiwa akibat pemberontakan tersebut.

#### **4.2 Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintah dengan Bangsamoro**

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meredam konflik tersebut. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos telah diupayakan berbagai cara untuk memendam pemberontakan tersebut. Seperti misalnya kampanye yang dilakukan Marcos untuk menarik simpati



Bangsamoro, seperti melakukan pembangunan ekonomi Filipina diberbagai sektor pasca baku hantam yang terjadi, serta dibangunnya tempat ibadah bagi umat Muslim di Manila dan kota-kota lainnya di Filipina, serta diakuinya libur hari raya umat Muslim.

Kampanye yang dilakukan oleh Marcos menghasilkan sebuah perjanjian damai, Perjanjian tersebut diberi nama Perjanjian Tripoli (*Tripoli Agreement*) yang ditandatangani pada tahun 1976. Isi kesepakatan tersebut adalah menjamin prinsip dasar otonomi Islam di Filipina Selatan dan pembentukan *Autonomous Region in Muslim Mindanao* (ARMM). Namun perjanjian ini mengalami kegagalan, karena ARMM yang merupakan isi dari Perjanjian Tripoli telah dibuat, namun tidak benar-benar dilaksanakan sebagaimana kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak. Selain itu, Pemerintah Filipina juga menganggap Perjanjian Tripoli melanggar Konstitusi 1973 mengenai Subdivisi Teritorial dan politik Filipina. Akibatnya, Bangsamoro menyatakan *jihad* (berjuang/berusaha keras) terhadap Pemerintah. Namun, keputusan ini tidak mendapat dukungan dari masyarakat Bangsamoro secara keseluruhan. Hingga akhirnya Bangsamoro yang lebih mendukung untuk tetap meneruskan upaya damai dengan Pemerintah di bawah bendera MILF.

Bangsamoro di bawah bendera MILF kembali berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka. Setelah bertahun-tahun angkat senjata, akhirnya Pemerintah di bawah Presiden Fidel V. Ramos kembali

mengupayakan jalan damai dengan MILF dan melahirkan *Final Peace Agreement* (FPA) pada 2 September 1996 yang isinya mengenai genjatan senjata. Namun, perjanjian tersebut hanya bertahan selama 3 tahun. Pada tahun 2000, di bawah kepemimpinan Presiden Joseph Estrada perjanjian tersebut dibatalkan (Thomas McKenna, 1998). Joseph Estrada yang lebih memilih tindakan koersif dengan tidak memberi dukungan penuh terhadap perjanjian damai tersebut akhirnya mengumumkan "perang habis-habisan". Perang kembali terjadi antara MILF dan Pemerintah selama bertahun-tahun tanpa adanya solusi untuk mengakhirinya. Kemudian pada tahun 2001, Presiden Estrada digulingkan karena kerugian besar yang dihadapi negara akibat perang tersebut.

Pada era kepemimpinan Gloria Arroyo, *Memorandum of Agreement on Ancestral Domain* (MOA-AD) dirancang untuk menghentikan penyerangan-penyerangan yang terjadi. Perjanjian ini akan berisi tentang pengaturan wilayah kekuasaan ARMM yang dulu telah dibuat sesuai dengan Perjanjian Tripoli akan diperluas. Bangsamoro juga diberikan lebih banyak kontrol wilayah dan sumber daya di bawah konsep hak asasi manusia dengan kewenangan membentuk pasukan kepolisian. Namun, perjanjian tersebut dibatalkan sepihak oleh Pemerintah Filipina ketika akan ditandatangani karena ada tekanan dari berbagai pihak untuk membatalkan perjanjian tersebut. Pemerintah beranggapan bahwa MILF memiliki hubungan dengan jaringan teror

Al-Qaeda dan tidak mampu membuktikan bahwa mereka tidak ada hubungan dengan jaringan tersebut. Akibatnya, MILF kembali melakukan penyerangan-penyerangan sebagai suatu bentuk kekecewaan terhadap pemerintah (Global Muslim, 2011)

Penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh MILF membuat Malaysia sebagai pihak yang diminta untuk menengahi konflik melakukan ancaman serius terhadap MILF. Menurut Mohagher Iqbal (ketua panel perdamaian MILF), Malaysia mengancam tidak akan mau menengahi konflik yang terjadi jika MILF tetap menginginkan untuk mendirikan negara independen. Akibat ancaman tersebut, maka MILF mulai berpikir kembali. MILF akhirnya memilih untuk dapat memerintah sendiri secara efektif dengan intervensi sedikit dari pemerintah pusat di Filipina Selatan (dikutip *Reuters* pada 2010).

Mohagher Iqbal selaku ketua panel perdamaian MILF, akhirnya menyodorkan formula baru perjanjian, yaitu pendirian semacam negara bagian seperti Amerika Serikat, tak sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat. Dengan adanya formula baru perjanjian, Iqbal menjabarkan bahwa negara bagian ini tidak akan memiliki kewenangan atas pertahanan nasional, kebijakan luar negeri, mata uang, dan kantor pos yang sudah dikontrol oleh pemerintah pusat. Namun, negara bagian ini akan memiliki pasukan bersenjata untuk keamanan internal. Berbekal draft tersebut, MILF dan Pemerintah Filipina kembali membuka dialog damai dibawah kepemimpinan Presiden Benigno Aquino.

Perundingan tersebut melahirkan sebuah perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak pada 15 Oktober 2012. Perjanjian tersebut diberi nama *Framework Agreement of Bangsamoro* (FAB).

#### **4.3.Faktor Pendorong *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) untuk menandatangani *Framework Agreement of Bangsamoro* (FAB) dengan Pemerintah Filipina Pada Tahun 2012**

Dirancang serta ditandatanganinya berbagai perjanjian tidak serta merta mampu meredam konflik yang ada. Berbagai perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak selalu mengalami kegagalan hingga pemberontakan terus terjadi. Malaysia, sebagai salah satu negara yang menawarkan untuk menjadi mediator mulai mendekati MILF agar menghentikan segala bentuk aksi pemberontakan dan mau untuk duduk bersama Pemerintah mencari solusi agar konflik dapat diatasi.

Mohagher Iqbal selaku ketua panel perdamaian MILF, akhirnya menyodorkan formula baru perjanjian, yaitu pendirian semacam negara bagian seperti di Amerika Serikat, tak sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat. Dimana negara bagian ini akan memiliki pasukan bersenjata untuk keamanan internal. Kewenangan atas pertahanan nasional, kebijakan luar negeri, mata uang, dan kantor pos yang sudah dikontrol pemerintah pusat akan tetap diatur oleh pemerintah pusat. Berbekal draft tersebut, MILF dan Pemerintah Filipina

kembali membuka dialog damai dibawah kepemimpinan Presiden Benigno Aquino.

Dialog antara MILF dengan Pemerintah Filipina tersebut diawali dengan dibentuknya sebuah badan *ad-hoc* untuk menjadi mediator dalam konflik ini. Badan tersebut bernama *International Contact Group* (ICG), yang berdiri pada 15 September 2009. Kemudian pada Januari 2011, pertemuan informal pertama antara kedua belah pihak diadakan. Pada 9 Februari 2011, perundingan kedua diadakan dengan membicarakan perundingan damai antara MILF dengan Pemerintah Filipina. MILF menyampaikan keinginan dan tuntutan mereka kepada Pemerintah (Philstar, 2014)

Pada 4 Agustus 2011, kedua belah pihak melakukan pertemuan di Narita, Jepang. Presiden Benigno Aquino meminta melakukan pertemuan informal dengan ketua MILF Al Haj Murad untuk memberikan perspektif dan visinya tentang penyelesaian konflik di Mindanao, karena Presiden Benigno Aquino ingin mempercepat perjanjian perdamaian untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. Setelah itu, pada 22 Agustus 2011, Pemerintah menyerahkan sebuah proposal kepada MILF. Pada 3 November 2011, Pemerintah dan MILF bertemu di Kuala Lumpur, Malaysia untuk membicarakan pemberontakan yang terjadi di Basilan dan Zamboanga pada saat itu. Kemudian pada Januari hingga Maret 2012, pembicaraan peninjauan antara kedua belah pihak kembali diadakan terkait perjanjian damai yang akan dilakukan (Philstar, 2014)

Pada 24 April 2012, pintu damai akhirnya terbuka. Kedua belah pihak menandatangani sebuah *lay out* sudut pandang umum mengenai prinsip-prinsip dasar. Kemudian pada 28-30 Mei 2012, Pemerintah Filipina dan MILF setuju untuk memperbaiki posisi masing-masing dalam agenda substantif, termasuk dalam pembagian kekayaan, pembagian kekuasaan dan pemerintahan, transisi dan normalisasi untuk entitas politik otonom baru yang akan menggantikan ARMM.

Pada 8-11 Agustus 2012, isu mengenai pembagian kekayaan dan kekuasaan dapat diselesaikan. Kemudian pada 5-8 September 2012, pembicaraan peninjauan kembali dilakukan. Pada 2-7 Oktober 2012, Pemerintah Filipina dan MILF menyepakati persetujuan kerangka kerja bersama. Hingga pada akhirnya tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Filipina dan MILF menandatangani kerangka kerja tersebut, yang diberi nama *Framework Agreement of Bangsamoro* (FAB). FAB ditandatangani oleh pengacara Marvic Leonen, perunding utama Pemerintah, dengan Mohagher Iqbal, utusan MILF di Istana Malacanang, Manila (Philstar, 2014)

Berbekal pengalaman dari perjanjian-perjanjian sebelumnya yang selalu mengalami kegagalan, maka MILF benar-benar berhati-hati agar kegagalan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Tentunya ada faktor yang mempengaruhi MILF mau menandatangani FAB, yang membuat mereka merasa diuntungkan dengan adanya perjanjian tersebut. Faktor-faktor tersebut akan dapat dilihat melalui isi

dari FAB. FAB akan berisi beberapa poin penting, yaitu mengenai Hak-hak Dasar Bangsamoro, Wilayah, Hukum Dasar Bangsamoro, Pembagian Pendapatan dan Kekayaan, Transisi dan Implementasi, dan Normalisasi.

Isi dari FAB tersebut mencerminkan bahwa beberapa poin penting yang terkandung didalamnya memang memiliki perbedaan dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dirancang dan ditandatangani oleh MILF dan Pemerintah Filipina. Poin terpenting yang terkandung dalam FAB terletak pada adanya pengakuan Bangsamoro sebagai sebuah entitas politik baru yang diberi nama "Bangsamoro" menggantikan ARMM, serta adanya perumusan Undang-undang Dasar Bangsamoro yang akan menjadi dasar hukum bagi bangsamoro yang didalamnya akan berisi tentang pemberian otonomi khusus bagi bangsamoro. Kedua poin tersebut dapat dikatakan sebagai faktor pendorong MILF mau menandatangani FAB dengan Pemerintah Filipina pada tahun 2012.

Pengakuan politik (*Political Recognition*) yang mencakup pengakuan Bangsamoro sebagai sebuah entitas baru yang diberi nama "Bangsamoro" menggantikan ARMM merupakan sebuah hal yang penting bagi Bangsamoro. Melalui pengakuan, Bangsamoro merasa diakui sebagai sebuah kelompok yang mendiami wilayah di Filipina bagian selatan. Selain itu, melalui pengakuan Bangsamoro sebagai sebuah entitas politik baru, Bangsamoro tidak lagi distigmatisasi

sebagai orang yang buta huruf, jahat, tidak bertuhan (*huramentados*), dan tukang bunuh.

Beberapa poin yang tercantum dalam kesepakatan juga dapat dikatakan sebagai sebuah pengakuan politik (*Political Recognition*), seperti pengakuan hak-hak dasar bagi Bangsamoro yang menyangkut hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berekspresi sesuai dengan agama dan keyakinan, hak untuk kebebasan berbicara, hak untuk mengekspresikan pendapat politik, hak untuk kebebasan tempat tinggal, hak untuk bebas dari segala bentuk pelecehan agama dan etnis, serta hak untuk masyarakat adat yang harus dihormati.

Pengakuan politik atau *Political Recognition* bagi Bangsamoro membuat Bangsamoro merasa bahwa keberadaan mereka sebagai sebuah etnis minoritas diakui, dihargai, serta dianggap sebagai bagian dari masyarakat Filipina secara menyeluruh, seperti yang dikemukakan oleh Charles Taylor bahwa masalah terbesar dalam multikulturalisme adalah pentingnya pengakuan (*recognition*) terhadap identitas bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan (*subaltern*). Selain itu, Taylor juga berpendapat bahwa dalam dunia internasional yang multicultural, tiap negara bangsa akan saling bersaing pada aspek budaya demi mendapatkan pengakuan secara politis. Karena pengakuan politis merupakan motor penggerak utama tumbuhnya identitas kebangsaan dan rasa nasionalisme yang

menjadi symbol kebanggaan dari sebuah negara bangsa (Charles Taylor, 1992)

Selain Charles Taylor, Will Kymlicka juga berpendapat bahwa dalam negara bangsa yang multikultural, identitas harus diberikan kepada kaum minoritas sebagai suatu pengakuan terhadap hak universal mereka sebagai warganegara secara keseluruhan, walaupun memiliki kebudayaan maupun adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat secara keseluruhan dalam sebuah negara (Will Kymlicka, 2001).

Ditandatanganinya FAB ini membuat Bangsamoro merasa dihargai, terlebih dengan diakuinya mereka sebagai sebuah entitas politik baru, Bangsamoro mempunyai wewenang untuk membuat hukum mereka sendiri yang sesuai dengan *syariah* Islam dibawah payung *Bangsamoro Basic Law* (BBL). Selain itu, pengakuan atas hak-hak dasar mereka juga diakui dalam FAB ini. Seperti misalnya hak untuk kebebasan berekspresi sesuai agama dan keyakinan mereka, hak untuk memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi, hak untuk bebas dari segala bentuk pelecehan agam dan etnis, serta hak-hak dasar lainnya yang telah tercantum dalam FAB. Pengakuan akan adanya Bangsamoro sebagai sebuah entitas politik merupakan hal baru yang tercantum dalam perjanjian ini, yang tidak ada dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya, sehingga pengakuan ini dikatakan sbagai faktor pendorong yang sangat penting hingga MILF mau menandatangani FAB.

Selain Pengakuan Politik, dalam FAB kali ini pemberian otonomi khusus juga masih menjadi satu faktor pendorong Bangsamoro untuk menandatangani FAB. Otonomi khusus yang diberikan kepada bangsamoro dalam FAB ini menyerupai negara bagian di Amerika Serikat sehingga Filipina Selatan tetap menjadi bagian dari negara Filipina secara utuh. Dengan adanya pemberian otonomi khusus ini, Bangsamoro akan lebih leluasa untuk mengatur wilayah mereka sendiri. Selain itu, pemberian otonomi khusus ini juga memberikan Bangsamoro kewenangan dalam hal merancang hukum dasar mereka sendiri sesuai dengan adat istiadat yang melekat pada diri mereka. Hukum dasar Bangsamoro akan diatur dalam UUD Bangsamoro (*Bangsamoro Basic Law*), dalam hukum dasar ini Bangsamoro akan memiliki bentuk menteri dan memiliki sistem peradilan *syariah*. Dengan adanya otonomi khusus ini, Bangsamoro juga akan memiliki kewenangan dalam hal pembagian pendapatan dan kekayaan.

Pemberian otonomi ini tentunya tidak begitu saja diberikan, akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan terkait hal ini. Otonomi diletakkan pada posisi paling strategis, yaitu di antara opsi merdeka di satu sisi dan perlindungan hak-hak minoritas di sisi lain. Selain itu, otonomi dikatakan sebagai alternatif penyelesaian konflik yang terbukti secara efektif mampu diterima sebagai bentuk kompromi *win to win solution* oleh pihak-pihak yang bertikai (dalam hal ini negara dan pihak pemberontak). Kemenangan akan

diperoleh oleh kedua belah pihak, baik pemerintah maupun kelompok etnis. Pemerintah tetap bisa mempertahankan integritas teritorialnya dan kelompok etnis mendapatkan kebebasan lebih besar untuk memerintah sendiri.

Otonomi khusus yang diberikan oleh Pemerintah Filipina dalam FAB ini benar-benar mewakili keinginan yang selama ini diinginkan oleh Bangsamoro secara keseluruhan. melalui otonomi khusus, Bangsamoro memiliki berbagai kewenangan lebih yang selama ini tidak pernah mereka dapatkan. Karena dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya, pemberian otonomi khusus bagi mereka masih terlihat rancu.

FAB kali ini juga mencantumkan mengenai transisi dan implementasi serta normalisasi, dimana kedua poin ini dicantumkan untuk mengawal serta mengawasi jalannya proses perdamaian di Filipina Selatan. Dalam poin transisi dan implementasi, akan dibentuk komisi transisi dengan fungsi menyusun UUD Bangsamoro, mengamandemen konstitusi Filipina, serta mengkoordinasi setiap bentuk program pengembangan. Kemudian, pada akhir periode transisi, Pemerintah Filipina dan MILF, bersama-sama dengan Malaysia sebagai fasilitator dan Tim Pemantau Pihak Ketiga, akan mengadakan pertemuan untuk meninjau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan. Sedangkan pada poin normalisasi, para pihak setuju bahwa normalisasi sangat penting dilakukan. Melalui normalisasi, masyarakat akan dapat

kembali pada kondisi dimana mereka dapat mencapai kualitas hidup yang mereka inginkan. Selain itu, normalisasi juga memiliki tujuan untuk memastikan keamanan manusia di Bangsamoro melalui pengurangan dan pengendalian penggunaan senjata api di daerah serta pembubaran tentara swasta dan kelompok bersenjata lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang mendasari disepakatinya perjanjian damai antara Pemerintah dengan MILF. Dengan diakuinya Bangsamoro sebagai sebuah entitas politik baru yang diberikan sebuah otonomi khusus oleh Pemerintah Filipina. melalui pemberian otonomi khusus ini, Bangsamoro akan memiliki kewenangan lebih dalam mengatur wilayah mereka sendiri. Selain itu, Bangsamoro juga akan memiliki hukum dasar yang mengatur hukum di wilayah bangsamoro yang akan tercantum dalam UUD Bangsamoro (*Bangsamoro Basic Law*) dengan model peradilan berdasarkan *syariah*. Atas dasar itulah MILF sebagai perwakilan Bangsamoro mau menandatangani sebuah kerangka kerja yang diberi nama *Framework of Bangsamoro* (FAB), yang ditandatangani pada 15 Oktober 2012 di Istana Malacanang, Filipina.

Adanya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meredam konflik ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Filipina berada pada masa de-eskalasi konflik. De-eskalasi konflik terjadi ketika konflik yang ada mulai mengalami penurunan hingga akhirnya kedua belah

pihak memilih untuk duduk bersama membicarakan konflik yang terjadi serta solusi apa yang akan diambil untuk menghentikan konflik tersebut.

Ditandatangani FAB antara Pemerintah Filipina dan MILF juga menunjukkan suatu bentuk de-eskalasi konflik. Karena melalui perjanjian yang ada, berarti konflik yang terjadi dapat diatasi dengan baik. Faktor pendorong MILF untuk menandatangani FAB ini terletak pada poin yang tercantum dalam FAB, yaitu diakunya Bangsamoro sebagai sebuah entitas politik baru, diberikannya otonomi khusus di Filipina Selatan, serta adanya payung hukum yang diberi nama *Bangsamoro Basic Law* (Undang-undang Dasar Bangsamoro) yang akan mengatur segala bentuk hak-hak dasar bagi Bangsamoro. Dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong ini termasuk kedalam bentuk faktor *intangible*, dimana faktor ini merupakan faktor yang tidak dapat terlihat, namun dapat dirasakan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara Bangsamoro dengan Pemerintah Filipina telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu, yaitu sejak zaman penjajahan. Konflik tersebut dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode sebelum merdeka, periode peralihan, dan periode sesudah merdeka. Namun, *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) baru terbentuk setelah Filipina mendapatkan kemerdekaannya. Perjuangan MILF adalah untuk

memperoleh kembali kemerdekaan yang telah dirampas secara immoral dan illegal, dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri (*Right to self-determination*). MILF berusaha untuk terus menyuarakan keinginan mereka kepada pemerintah melalui diplomasi. Namun, semua tuntutan yang disuarakan oleh MILF tidak mendapat respon dari Pemerintah Filipina. Akibat dari tuntutan MILF tidak didengar Pemerintah, maka MILF melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap warga sipil di Filipina agar Pemerintah mau merespon tuntutan mereka.

Pemerintah berupaya meredam konflik tersebut dengan merancang menandatangani berbagai perjanjian, seperti *Tripoli Agreement* pada 1976, *Final Peace Agreement (FPA)* pada 1996, dan *Memorandum of Agreement on Ancestral Domain (MOA-AD)* pada 2008. Namun perjanjian tersebut juga mengalami kegagalan dan menyebabkan berbagai pemberontakan.

Setelah melalui usaha yang panjang untuk meyakinkan kembali Bangsamoro agar konflik dapat terselesaikan, akhirnya Pemerintah Filipina berhasil membuka kembali dialog dan menandatangani sebuah kerangka kerja yang diberi nama *Framework Agreement of Bangsamoro* (FAB) dengan MILF pada 15 Oktober 2012.

FAB berisikan tentang pembentukan sebuah entitas politik baru yang diberi nama "Bangsamoro dengan diakunya berbagai hak-hak dasar Bangsamoro terkait kebebasan hidup, beragama, berekspresi,

serta bebas dari segala bentuk diskriminasi. Selain itu, FAB juga mencantumkan pemberian sebuah otonomi khusus, dimana melalui pemberian otonomi khusus ini Bangsamoro akan memiliki kewenangan lebih dalam mengatur wilayah mereka sendiri serta pemberlakuan hukum dasar Bangsamoro akan dicantumkan pada UUD Bangsamoro.

Tidak mudah membuat Bangsamoro untuk menandatangani kembali sebuah perjanjian dengan Pemerintah mengingat berbagai perjanjian sebelumnya selalu mengalami kegagalan. Adanya sebuah pengakuan entitas politik baru yang diberi nama Bangsamoro dan pemberian otonomi khusus dari Pemerintah dikatakan sebagai faktor pendorong hingga MILF sebagai wakil Bangsamoro akhirnya mau menandatangani *Framework Agreement of Bangsamoro* dengan Pemerintah Filipina di Istana Malacanang, Filipina pada 15 Oktober 2012. Peristiwa penandatanganan FAB ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi telah mengalami fase de-eskalasi konflik, dimana konflik sudah mulai dapat diatasi hingga perjanjian mampu ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## 5.2 Saran

Konflik Filipina dengan Bangsamoro menjadi konflik berkepanjangan karena tindakan Pemerintah Filipina yang tidak konsekuen dengan segala perjanjian yang telah ditandatangani. Sikap Pemerintah yang selalu tidak memenuhi isi dari perjanjian yang telah ditandatangani pada akhirnya akan selalu memunculkan kesalahpahaman diantara kedua belah

pihak. Pemerintah diharapkan agar selalu terbuka dengan Bangsamoro terkait kebijakan-kebijakan yang diambil, agar tidak memunculkan kesalahpahaman yang berujung pada pemberontakan kembali.

Selain itu, dibutuhkan juga sebuah badan untuk mengawasi perjanjian yang telah disepakati agar semua tindakan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Melalui FAB, diharapkan konflik yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun dapat terselesaikan. Diharapkan pula langkah Pemerintah sesuai dengan isi perjanjian FAB, agar Bangsamoro mendapatkan keadilan mereka sebagai kaum minoritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bloomfield, David., Nupen, Charles., dan Haris, Peter.. "Proses-proses Negosiasi" dalam Haris, Peter dan Reilly, Ben. (eds.). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Negosiator* (Jakarta: International IDEA, 2000).
- Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* (Washington, D.C.: USIP Press, 1996)
- Development, Bangsamoro. 2015. *Chapter 2*. [http://bangsamorodevelopment.org/wp-content/uploads/2015/05/CHAPTER-2\\_BDP-Integrative-Report.pdf](http://bangsamorodevelopment.org/wp-content/uploads/2015/05/CHAPTER-2_BDP-Integrative-Report.pdf) diakses pada 22 Oktober 2016
- G. Fenwick, Charkes. (1965). *International Law*, 4<sup>th</sup> Edition. New York: Appleton Century Croft,.
- Guerra, Lizzie. (2010). *Mindanao Conflict: Structural dpispowerment in the Southern Phiippines*. Dikutip dari [http://www.usfca.edu/uploadedFiles/Destintions/College\\_of\\_Arts\\_and\\_Sciences/Undergraduate\\_Programs/Peac](http://www.usfca.edu/uploadedFiles/Destintions/College_of_Arts_and_Sciences/Undergraduate_Programs/Peac)



- [e and Justice Studies/Student Research/Philippines.pdf](#). Diakses pada 14 Februari 2016
- Huang, Lisa., Musembi, Victor., Petronic, Ljiljana. (2012). *The State-Moro Conflict in the Philippines*. Dikutip dari <http://www4.carleton.ca/cifp/app/service.php/1392.pdf> yang diakses pada 13 Februari 2016
- Kompasiana. Penyebab Perang. [http://www.kompasiana.com/prespetif.com/penyebab-perang\\_5500bc62813311dd17fa7c92](http://www.kompasiana.com/prespetif.com/penyebab-perang_5500bc62813311dd17fa7c92). Diakses pada tanggal 18 Februari 2016
- Kriesberg, Louis. *Constructive Conflict: From Escalation to Resolution* (New York: Rowman & Littlefield, Publ., 1998).
- Kymlicka, Will. 2001. *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multinationalism, and Citizenship*. Oxford: University Press. Dikutip dari <https://construcciondeidentidades.files.wordpress.com/2015/02/will-kymlicka-politics-in-the-vernacular-nationalism-multiculturalism-and-citizenship-oxford-university-press-2001.pdf> Diakses pada 12 Oktober 2016
- McKenna, Thomas M. (1998). *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*. Berkeley: University of California Press
- Mohtar Mas'ood [Editor], Colin Mac Andrews. Cetakan Ketujuh Belas. (2006). *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Halaman 58
- Muslim, Global. 2011. *Siapa Radikal Siapa Teroris*. <http://www.globalmuslim.web.id/2011/05/siapa-radikal-siapa-teroris-pembantaian.html?m=0>. Diakses pada 28 November 2016
- Muttaqin, Azmi. *Otonomi Khusus Papua: Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan Papua*. Jurnal. Dikutip dari <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/6064/5172> diakses pada 17 Agustus 2016
- Philstar. *Timeline Government Republic of Philippine*. <http://www.philstar.com/headlines/2014/01/26/1283079/timeline-grp-milf-peace-negotiations>. Diakses pada 28 November 2016
- Rothman, J. *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict* (Newbury Park, CA: Sage, 1992).
- Saprianingsih, Fatimah. (2011). *Resolusi Konflik dan Gerakan Separatisme GAM di Aceh: Study Kasus Peran CMI sebagai Mediator Konflik antara Pemerintah RI dan GAM di Aceh*. Skripsi. Dikutip dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24120/1/FATIMAH%20SAPRIANINGSIH.pdf> diakses pada tanggal 17 Agustus 2016
- Silalahi, Ulber.(2012). *Metode Penulisan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Taylor, Charles. 1992. *The Politics of Recognition*. Dalam Amy Gutman (Eds). *Multikulturalism, Examining the Politics of Recognition*. Princeton: Princeton University Press. Dikutip dari [http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/Politics\\_of\\_Recognition.pdf](http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/Politics_of_Recognition.pdf) Diakses pada 11 Oktober 2016
- Wiharyanto, A Kardiyat. 2011. *Sejarah Asia Tenggara Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbanggunnya Kerjasama Asean*. Yogyakarta: Dharma.
- Zatman, William I.. *Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa* (New York: Oxford University Press, 1985).